



Arah Baru Ekonomi Indonesia: Dari Stabilitas Menuju Transformasi Struktural

Oleh
Rudy C Tarumingkeng

Rudy C Tarumingkeng : *Arah Baru Ekonomi Indonesia: Dari Stabilitas*
Menuju Transformasi Struktural

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari)

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyct75@gmail.com

3 Maret 2026

ARAH BARU EKONOMI INDONESIA: DARI STABILITAS MENUJU TRANSFORMASI STRUKTURAL

Pendahuluan

Dalam dua dekade terakhir, ekonomi Indonesia telah memperlihatkan satu kualitas yang sangat penting dalam ilmu ekonomi pembangunan, yakni **kemampuan bertahan**. Di tengah gejolak krisis finansial global, pandemi, gejolak harga komoditas, pengetatan keuangan internasional, dan meningkatnya ketegangan geopolitik, Indonesia tidak runtuh. Bahkan, pada saat banyak negara masih bergulat dengan pemulihan yang rapuh, ekonomi Indonesia pada tahun 2025 justru tumbuh **5,11 persen**, lebih tinggi daripada pertumbuhan tahun 2024 sebesar **5,03 persen**. Nilai Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku mencapai **Rp23.821,1 triliun**, dengan PDB per kapita sekitar **Rp83,7 juta** atau **US\$5.083,4**. Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa tumbuh paling tinggi, yakni **7,03 persen**. Ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tidak hanya hidup karena konsumsi, tetapi juga masih memiliki tenaga pada investasi dan ekspor. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Akan tetapi, sejarah ekonomi mengajarkan bahwa **stabilitas** dan **kemajuan** bukanlah hal yang sama. Banyak negara mampu

mempertahankan kestabilan makroekonomi untuk waktu yang lama, tetapi tidak semuanya berhasil mengubah stabilitas itu menjadi transformasi produktivitas, pekerjaan yang lebih baik, dan kenaikan pendapatan yang berkelanjutan. Indonesia kini sedang berhadapan dengan pertanyaan besar semacam itu. Apakah stabilitas yang sudah dibangun selama ini akan cukup untuk membawa Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045? Atau justru stabilitas itu harus dipandang sebagai tahap awal, sebagai landasan untuk melompat menuju struktur ekonomi yang lebih modern, lebih produktif, dan lebih inklusif? Pertanyaan ini menjadi semakin penting karena IMF menilai bahwa pertumbuhan Indonesia tetap kuat dan inflasi jangka menengah terkendali, tetapi risiko penurunan masih besar akibat guncangan kebijakan perdagangan, ketidakpastian yang berkepanjangan, dan volatilitas pasar keuangan global. ([IMF eLibrary](#))

Di titik inilah frasa “**arah baru ekonomi Indonesia**” menjadi relevan. Arah baru itu tidak berarti Indonesia harus meninggalkan stabilitas. Sebaliknya, ia berarti bahwa Indonesia harus **melampaui stabilitas**. Stabilitas tetap penting sebagai fondasi, tetapi fondasi yang baik tidak boleh berhenti sebagai fondasi. Ia harus dipakai untuk membangun rumah yang lebih besar. Dalam konteks ekonomi, rumah yang lebih besar itu adalah **transformasi struktural**: pergeseran dari pertumbuhan yang bertumpu pada konsumsi, komoditas, dan jasa bernilai tambah rendah menuju pertumbuhan yang ditopang oleh produktivitas, industri bernilai tambah tinggi, jasa modern, sumber daya manusia unggul, inovasi, dan tata kelola yang lebih efektif. World Bank secara eksplisit menilai bahwa Indonesia dapat membuka pertumbuhan yang lebih cepat dan pekerjaan yang lebih baik melalui reformasi yang mendukung dunia usaha dan lingkungan regulasi yang stabil, sementara laporan World Bank lain menegaskan bahwa reformasi sektor jasa dapat meningkatkan penciptaan kerja dan mengangkat pertumbuhan PDB ke kisaran **5,3–5,5 persen pada 2026–2027**. ([World Bank](#))

Esai ini akan menegaskan satu argumen pokok: **Indonesia tidak boleh puas hanya menjadi ekonomi yang stabil; Indonesia harus menjadi ekonomi yang berubah secara struktural.** Stabilitas adalah pencapaian. Namun tanpa transformasi struktural, pencapaian itu dapat berubah menjadi plafon yang membatasi. Karena itu, arah baru ekonomi Indonesia perlu dibangun di atas sintesis antara **ketahanan makroekonomi** dan **keberanian reformasi.**

I. Stabilitas sebagai modal awal, bukan garis akhir

Untuk memahami mengapa Indonesia kini berbicara tentang arah baru, kita perlu menghargai terlebih dahulu apa yang telah dicapai. Stabilitas makroekonomi Indonesia saat ini bukan hasil kebetulan. Ia dibangun melalui kombinasi pengelolaan moneter, fiskal, dan eksternal yang cukup disiplin. Pada Februari 2026, Bank Indonesia mempertahankan **BI-Rate pada 4,75 persen**, dengan penekanan pada dorongan pertumbuhan ekonomi sekaligus penguatan stabilitas nilai tukar rupiah. BI juga menyatakan bahwa cadangan devisa pada akhir Januari 2026 tetap tinggi, yaitu **US\$154,6 miliar**, setara dengan **6,3 bulan impor** atau **6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah**, jauh di atas standar kecukupan internasional. Selain itu, neraca pembayaran Indonesia pada 2026 diperkirakan tetap terjaga dengan defisit transaksi berjalan yang sehat dalam kisaran **0,9 persen hingga 0,1 persen dari PDB.** ([Bank Indonesia](#))

Dari sisi fiskal, pemerintah juga masih memiliki kapasitas untuk menjalankan fungsi penyangga. APBN KiTa Februari 2026 menunjukkan bahwa hingga akhir Januari 2026, **pendapatan negara mencapai Rp172,7 triliun**, tumbuh **9,5 persen** secara tahunan, sementara **belanja negara mencapai Rp227,3 triliun**, tumbuh **25,7 persen**. Defisit tercatat **Rp54,6 triliun** atau sekitar **0,21 persen dari PDB**. Gambaran ini menunjukkan bahwa fiskal Indonesia masih aktif, masih punya ruang untuk menopang prioritas pembangunan dan menjaga daya beli, namun

tetap berada dalam kerangka yang relatif terkendali. Dengan kata lain, Indonesia memiliki negara yang masih bisa bekerja secara kontra-siklis ketika dunia sedang tidak stabil. (media.kemenkeu.go.id)

Pada sektor eksternal, gambaran ketahanan juga terlihat. Neraca perdagangan Indonesia sepanjang 2025 mencatat surplus **US\$41,05 miliar**, dan pada Januari 2026 surplus masih berlanjut sebesar **US\$0,95 miliar**, terutama berasal dari surplus sektor nonmigas. Ini penting, sebab dalam banyak krisis negara berkembang, masalah biasanya mulai dari sektor eksternal: impor melonjak, devisa menipis, mata uang tertekan, lalu stabilitas makro goyah. Untuk saat ini, Indonesia belum berada dalam zona seperti itu. Ia masih memiliki bantalan dari perdagangan dan cadangan devisa. (Badan Pusat Statistik Indonesia)

Secara sosial, perbaikan juga tetap terjadi. Tingkat pengangguran terbuka pada November 2025 turun menjadi **4,74 persen**, dengan jumlah penduduk bekerja mencapai **147,91 juta orang**. Rata-rata upah buruh tercatat **Rp3,33 juta**. Sementara itu, persentase penduduk miskin pada September 2025 turun menjadi **8,25 persen**, lebih rendah daripada Maret 2025 dan juga lebih rendah dibanding setahun sebelumnya. Data ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi belum terputus dari perbaikan sosial. Ia masih memiliki daya untuk menurunkan pengangguran dan kemiskinan. (Badan Pusat Statistik Indonesia)

Namun di sinilah kritik penting harus mulai disampaikan. **Stabilitas yang terjaga tidak otomatis berarti transformasi telah terjadi.** Angka-angka yang sehat di permukaan dapat menyembunyikan masalah struktur di bawahnya: produktivitas yang melambat, pekerjaan bernilai tambah rendah, upah riil yang lemah, ketimpangan wilayah, serta kapasitas industri yang belum cukup dalam. World Bank menegaskan bahwa Indonesia dapat tumbuh lebih cepat dan menciptakan pekerjaan yang lebih baik jika fokus beralih kepada reformasi yang memungkinkan dunia usaha berkembang dan kepada lingkungan regulasi yang stabil.

Dengan kata lain, stabilitas Indonesia saat ini adalah **modal awal yang kuat**, tetapi bukan bukti bahwa model pertumbuhannya sudah selesai. ([World Bank](#))

II. Mengapa stabilitas saja tidak cukup

Masalah paling mendasar dari ekonomi yang hanya mengandalkan stabilitas adalah bahwa ia bisa **terlihat sehat tanpa benar-benar bergerak naik kelas**. Suatu negara dapat tumbuh 5 persen selama bertahun-tahun, tetapi bila pertumbuhan itu lebih banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga, ekspor komoditas mentah, jasa bernilai tambah rendah, dan proyek-proyek investasi yang tidak cukup mendalam keterkaitannya, maka ekonomi tersebut akan mengalami apa yang dapat disebut sebagai **pertumbuhan tanpa lompatan**. Ia tidak jatuh, tetapi juga tidak melonjak.

Indonesia memperlihatkan gejala risiko seperti itu. Di satu sisi, investasi tetap kuat dan realisasi investasi 2025 mencapai **Rp1.931,2 triliun**, tumbuh **12,7 persen** secara tahunan. Investasi di bidang hilirisasi bahkan melonjak **43,3 persen**. Ini adalah kabar baik. Akan tetapi, investasi yang besar belum tentu identik dengan transformasi yang dalam. Pertanyaan yang lebih penting adalah: **apa isi investasi itu?** Apakah ia menciptakan pemasok domestik? Apakah ia mengangkat kapasitas teknologi nasional? Apakah ia membentuk ekosistem industri yang berumur panjang? Apakah ia mendorong pekerjaan yang lebih produktif? Tanpa jawaban yang kuat atas pertanyaan-pertanyaan ini, investasi besar dapat menghasilkan pertumbuhan, tetapi belum tentu menghasilkan perubahan struktur. (bkpm.go.id)

Hal yang sama berlaku untuk pasar kerja. BPS memang menunjukkan perbaikan dalam pengangguran dan jumlah orang yang bekerja. Tetapi World Bank memperingatkan bahwa Indonesia masih perlu menciptakan **better jobs**, bukan sekadar lebih banyak pekerjaan. Laporan *Running Faster, for Longer* menyatakan bahwa Indonesia dapat membuka

pertumbuhan yang lebih cepat dan pekerjaan yang lebih baik bila fokus bergeser ke reformasi yang mendorong usaha dan stabilitas regulasi. Artinya, masalah Indonesia kini bukan lagi semata ketersediaan pekerjaan, melainkan mutu pekerjaan. Ini adalah perbedaan yang sangat penting. Pekerjaan yang banyak tetapi berproduktivitas rendah hanya akan menopang pertumbuhan yang dangkal. ([World Bank](#))

World Bank juga mencatat bahwa pertumbuhan riil upah mengalami tekanan; pada 2024, **upah riil turun secara ekonomi sebesar 1,1 persen**, dan laporan terkait menegaskan bahwa lemahnya pertumbuhan upah riil menekan konsumsi rumah tangga dan pembentukan kelas menengah. Ini berarti bahwa bahkan ketika orang bekerja, hasil dari kerja itu belum sepenuhnya cukup untuk mendorong mobilitas sosial yang kuat. Dalam jangka panjang, ekonomi yang tidak dapat menghasilkan pertumbuhan upah riil yang sehat akan mengalami hambatan permintaan domestik, keterbatasan tabungan rumah tangga, dan frustrasi sosial yang semakin besar. ([World Bank](#))

Lebih jauh lagi, stabilitas Indonesia juga masih berjalan di tengah lingkungan global yang tidak ramah. OECD memproyeksikan pertumbuhan global melambat dari **3,2 persen pada 2025** menjadi **2,9 persen pada 2026**, sementara WTO menilai prospek perdagangan untuk paruh kedua 2025 dan 2026 kurang optimistis karena tarif yang lebih tinggi dan ketidakpastian kebijakan dagang yang masih besar. Di dunia seperti ini, ekonomi yang hanya mengandalkan pola lama akan makin sulit naik kelas. Globalisasi tidak sepenuhnya hilang, tetapi ia kini lebih selektif, lebih politis, dan lebih menuntut daya saing yang riil. ([OECD](#))

Karena itulah Indonesia memerlukan **arah baru**. Arah baru ini bukan reaksi panik terhadap krisis, melainkan penyesuaian strategis terhadap fakta bahwa stabilitas makro yang sudah dicapai harus diterjemahkan menjadi **stabilitas yang produktif, stabilitas yang mempercepat**

transformasi, dan stabilitas yang membangun kemampuan bangsa untuk tumbuh dengan mutu lebih tinggi.

III. Apa yang dimaksud dengan transformasi struktural?

Dalam diskursus pembangunan, **transformasi struktural** berarti perubahan komposisi ekonomi dari aktivitas berproduktivitas rendah menuju aktivitas berproduktivitas lebih tinggi. Tetapi definisi ini perlu diperkaya. Dalam konteks Indonesia masa kini, transformasi struktural tidak cukup dimaknai hanya sebagai perpindahan tenaga kerja dari pertanian ke industri atau jasa. Ia harus dipahami sebagai empat perubahan serentak.

Pertama, perubahan dari **nilai tambah rendah** ke **nilai tambah tinggi**. Ini berarti Indonesia tidak cukup mengeksport bahan mentah atau produk setengah jadi. Indonesia harus bergerak ke pengolahan yang lebih dalam, manufaktur lanjut, desain, rekayasa, jasa purna jual, dan inovasi.

Kedua, perubahan dari **pertumbuhan berbasis faktor** ke **pertumbuhan berbasis produktivitas**. Selama satu fase, ekonomi bisa tumbuh karena tambahan tenaga kerja, tambahan modal, atau harga komoditas yang mendukung. Tetapi untuk tumbuh lebih cepat dan lebih lama, ekonomi harus meningkatkan efisiensi, teknologi, organisasi produksi, serta kualitas institusi. Itulah sebabnya World Bank menempatkan produktivitas dan good jobs sebagai pusat laporan pertumbuhan terbarunya untuk Indonesia. ([World Bank](#))

Ketiga, perubahan dari **pekerjaan banyak** ke **pekerjaan baik**. Pekerjaan baik bukan sekadar pekerjaan formal. Ia adalah pekerjaan yang produktif, menghasilkan upah lebih tinggi, memungkinkan pembelajaran keterampilan, dan memberi peluang mobilitas sosial. Bila transformasi struktural tidak menghasilkan perbaikan kualitas kerja, maka ia akan kehilangan legitimasi sosialnya.

Keempat, perubahan dari **ekonomi analog** ke **ekonomi yang ditopang fondasi digital**. Digitalisasi tidak boleh hanya berarti ledakan konsumsi platform. Ia harus berarti peningkatan efisiensi logistik, keuangan, pendidikan, kesehatan, tata kelola, dan model bisnis UMKM. World Bank menunjukkan bahwa Indonesia memiliki ekonomi digital terbesar di ASEAN, dengan **GMV mencapai US\$99 miliar pada 2025**, tetapi fondasi digital—dari kualitas konektivitas hingga kepercayaan digital dan kerangka GovTech—masih harus diperkuat agar digitalisasi benar-benar produktif. ([World Bank](#))

Dengan demikian, transformasi struktural bukan slogan yang abstrak. Ia adalah proses yang sangat nyata: mengubah apa yang diproduksi, bagaimana diproduksi, siapa yang diuntungkan, dan jenis pekerjaan apa yang diciptakan.

IV. Pilar pertama: menjaga stabilitas, tetapi menjadikannya produktif

Arah baru ekonomi Indonesia harus dimulai dari pengakuan bahwa stabilitas makro tetap merupakan fondasi yang tak tergantikan. Inflasi yang tinggi, kurs yang tak terkendali, dan defisit fiskal yang tidak kredibel akan merusak semua agenda transformasi. Karena itu, kebijakan moneter dan fiskal yang hati-hati tetap harus dipertahankan. BI yang menahan suku bunga di **4,75 persen** sambil fokus pada stabilisasi rupiah menunjukkan bahwa otoritas moneter memahami tantangan ganda: mendorong pertumbuhan dan menjaga kepercayaan pasar. ([Bank Indonesia](#))

Namun yang dibutuhkan Indonesia sekarang adalah **stabilitas yang produktif**. Artinya, kestabilan nilai tukar, inflasi, dan fiskal tidak berhenti sebagai hasil statistik, melainkan harus diteruskan ke sektor riil. Kredit harus lebih efektif mengalir ke sektor-sektor produktif. Instrumen fiskal harus digunakan untuk menurunkan biaya logistik, memperbaiki layanan publik, dan memperluas investasi dalam modal manusia. Cadangan

devisa yang kuat dan fiskal yang masih memiliki ruang seharusnya membuat Indonesia berani membangun fondasi pertumbuhan yang lebih berkualitas, bukan hanya merayakan kestabilan jangka pendek. ([Bank Indonesia](#))

Narasinya dapat dibayangkan begini. Sebuah negara yang hanya menjaga stabilitas akan mirip rumah tangga yang sangat pandai menyeimbangkan anggaran bulanan, tetapi tidak pernah memakai tabungannya untuk pendidikan, kesehatan, atau usaha yang lebih produktif. Secara akuntansi, rumah tangga itu tampak sehat. Tetapi secara historis, ia tidak bergerak. Indonesia tidak boleh menjadi seperti itu. Stabilitas harus menjadi **modal untuk memperbesar kapasitas nasional**, bukan hanya alat untuk menghindari masalah.

V. Pilar kedua: hilirisasi yang lebih dalam dan reindustrialisasi yang cerdas

Selama beberapa tahun terakhir, hilirisasi telah menjadi kata kunci dalam kebijakan ekonomi Indonesia. Dan memang, dari segi realisasi investasi, kebijakan ini menunjukkan hasil awal yang nyata. Realisasi investasi total 2025 tumbuh **12,7 persen**, dan investasi hilirisasi melonjak **43,3 persen**. Ini menunjukkan bahwa Indonesia telah berhasil mengubah sebagian persepsi investor: dari negara pengeksport bahan mentah menjadi negara yang lebih serius membangun nilai tambah. (bkpm.go.id)

Akan tetapi, arah baru ekonomi Indonesia menuntut **hilirisasi tahap kedua**. Tahap pertama hilirisasi cenderung fokus pada pengolahan awal: smelter, refinery, dan penguatan nilai tambah dasar. Tahap kedua harus lebih dalam. Indonesia harus mulai bertanya: setelah pengolahan dasar, lalu apa? Apakah Indonesia akan memproduksi komponen? Apakah Indonesia akan memiliki pabrik manufaktur lanjutan? Apakah Indonesia akan mengembangkan kemampuan desain, material engineering, sertifikasi, dan riset? Apakah perguruan tinggi dan politeknik terhubung ke kebutuhan kawasan industri? Bila tidak, hilirisasi akan menjadi

loncatan nilai tambah yang pendek, bukan perubahan struktur yang dalam.

Di sini reindustrialisasi Indonesia harus dibaca dengan lebih cerdas. Reindustrialisasi bukan berarti kembali ke industri padat karya tradisional semata, tetapi membangun **basis industri yang berlapis**: industri pengolahan, jasa modern yang menyokong industri, pemasok domestik, dan tenaga kerja terampil. Indonesia perlu membentuk hubungan yang rapat antara proyek-proyek besar dengan usaha nasional yang lebih kecil. Tanpa linkages domestik, investasi besar hanya akan menjadi pulau-pulau pertumbuhan. Dengan linkages yang baik, ia dapat menjadi ekosistem pertumbuhan.

Contoh sederhananya dapat dilihat pada sebuah kawasan industri yang hanya mengimpor mesin, mengolah bahan baku, lalu mengekspor hasil antara. Aktivitas itu memang menambah PDB. Tetapi bila di sekitar kawasan itu tidak tumbuh pemasok lokal, laboratorium uji, sekolah vokasi, jasa logistik efisien, dan usaha pendukung lain, maka dampak pembelajarannya kecil. Sebaliknya, jika kawasan itu menjadi pusat pelatihan teknisi, pengembangan UMKM pemasok, kerja sama dengan universitas, dan inovasi proses, maka ia menjadi motor transformasi struktural. Arah baru Indonesia harus menempatkan hilirisasi pada skenario kedua.

VI. Pilar ketiga: reformasi jasa, logistik, dan perdagangan

Salah satu koreksi paling penting terhadap cara berpikir lama tentang pembangunan adalah kesadaran bahwa **jasa bukan sektor residual**. Jasa yang kompetitif justru merupakan fondasi dari industri yang kuat. Logistik, keuangan, teknologi informasi, layanan profesional, distribusi, pergudangan, transportasi, bahkan desain dan *business services* adalah bagian dari mesin produktivitas modern. Laporan World Bank tentang *Services Competitiveness for Growth and Jobs in Indonesia* secara eksplisit menyatakan bahwa reformasi pada sektor jasa akan menghasilkan

penciptaan kerja yang lebih baik dan berpotensi menaikkan pertumbuhan PDB Indonesia menjadi **5,3–5,5 persen pada 2026–2027**. ([Open Knowledge World Bank](#))

Implikasinya sangat besar. Selama ini perdebatan tentang ekonomi Indonesia sering terlalu berat pada komoditas, fiskal, dan proyek fisik. Padahal, bila biaya logistik tetap tinggi, rantai pasok tidak efisien, layanan profesional mahal atau terbatas, dan hambatan perdagangan non-tarif terlalu kompleks, maka industri nasional akan selalu memikul beban yang tidak perlu. IMF juga menegaskan bahwa pengurangan hambatan non-tarif, serta reformasi pelengkap di bidang modal manusia dan logistik, dapat memperkuat integrasi dagang Indonesia dan memperluas keunggulan komparatifnya di berbagai sektor. ([IMF](#))

Di sinilah hubungan antara perdagangan dan transformasi struktural menjadi sangat penting. Dalam dunia yang lebih terfragmentasi, Indonesia memang harus waspada. Tetapi kewaspadaan tidak boleh berubah menjadi tertutupan. Justru di tengah perubahan rantai pasok global, Indonesia mempunyai peluang untuk tampil sebagai lokasi produksi yang menarik—asal ia benar-benar “open for business” dalam arti yang substantif: perizinan lebih sederhana, biaya perdagangan turun, logistik lebih andal, dan kepastian kebijakan lebih kuat. IMF menyebut bahwa program liberalisasi dagang yang ambisius, ditambah reformasi struktural, dapat membuat Indonesia “open for business” di tengah pergeseran rantai pasok global. ([IMF](#))

Contoh konkretnya begini. Bayangkan sebuah produsen komponen otomotif atau elektronik internasional mempertimbangkan lokasi baru di Asia. Ia tidak hanya bertanya soal upah tenaga kerja. Ia akan melihat berapa lama barang tertahan di pelabuhan, berapa kompleks prosedur bea cukai, apakah internet dan listrik andal, apakah pemasok lokal tersedia, dan apakah aturan berubah tiba-tiba. Jadi, arah baru ekonomi Indonesia harus membuat biaya melakukan bisnis di Indonesia turun

secara sistematis. Itulah reformasi jasa, logistik, dan perdagangan dalam arti yang paling nyata.

VII. Pilar keempat: investasi publik yang lebih besar, tetapi juga lebih efisien

Transformasi struktural tidak akan terjadi hanya karena pasar bekerja sendiri. Negara tetap memegang peran penting, terutama dalam **investasi publik**. IMF dalam kajian *Making The Most Out of Public Investment* menegaskan bahwa peningkatan investasi publik seharusnya menjadi salah satu pilar utama upaya Indonesia menuju Visi 2045. Tetapi IMF menambahkan syarat yang sangat penting: peningkatan investasi publik itu harus dibarengi kebijakan untuk meningkatkan **efisiensi investasi publik**, agar dampaknya maksimal. Selain itu, mobilisasi pendapatan tambahan diperlukan untuk menyediakan ruang fiskal sambil tetap mematuhi aturan fiskal yang selama ini dijaga Indonesia. [\(IMF\)](#)

Pesan IMF ini sangat relevan. Indonesia memerlukan lebih banyak investasi pada infrastruktur fisik, modal manusia, sistem logistik, kesehatan, pendidikan, dan fondasi digital. Namun Indonesia juga harus menghindari jebakan klasik negara berkembang, yakni menganggap bahwa semakin besar belanja publik pasti semakin baik. Tidak. Yang menentukan bukan hanya jumlah, tetapi **kualitas, pemilihan prioritas, dan efisiensi pelaksanaan**.

Dalam konteks APBN 2026, fungsi penyangga itu sudah terlihat. Pemerintah masih memakai fiskal untuk mendorong prioritas dan melindungi masyarakat. Tetapi untuk arah baru ekonomi Indonesia, APBN harus lebih dari sekadar alat stabilisasi. Ia harus menjadi **mesin transformasi**. Belanja untuk infrastruktur perlu dilihat bukan hanya dari panjang jalan atau jumlah proyek, melainkan dari seberapa besar ia menurunkan biaya logistik. Belanja pendidikan perlu dilihat bukan hanya dari besaran anggaran, tetapi dari seberapa besar ia meningkatkan

keterampilan yang relevan. Belanja kesehatan perlu diukur dari dampaknya pada produktivitas tenaga kerja. Jika orientasi seperti ini menguat, maka Indonesia tidak hanya menghabiskan uang negara, tetapi benar-benar mengubah kapasitas nasional.

VIII. Pilar kelima: good jobs, keterampilan, dan sumber daya manusia

Transformasi struktural yang tidak menghasilkan **pekerjaan baik** akan cepat kehilangan dukungan sosial. Karena itu, arah baru ekonomi Indonesia harus berangkat dari pertanyaan sederhana namun penting: pekerjaan seperti apa yang akan diciptakan oleh pertumbuhan di masa depan?

Laporan World Bank terbaru tentang pertumbuhan dan pekerjaan menekankan bahwa Indonesia memerlukan reformasi yang dapat mempercepat pertumbuhan sekaligus menghasilkan **better jobs**. Ini berarti tantangan Indonesia bukan sekadar pengangguran terbuka, melainkan bagaimana memastikan bahwa pekerjaan baru yang tercipta lebih produktif, lebih formal, dan memberi peluang pendapatan yang lebih tinggi. ([World Bank](#))

Masalah ini terkait erat dengan keterampilan. Jika hilirisasi didorong tanpa pendidikan vokasi yang memadai, maka perusahaan akan kesulitan mendapatkan teknisi, operator, analis data, insinyur proses, dan manajer produksi yang dibutuhkan. Jika ekonomi digital tumbuh tanpa keterampilan digital dasar dan menengah, maka yang berkembang hanya konsumsi platform, bukan inovasi produktif. Jika reformasi jasa tidak dibarengi pelatihan profesional, maka jasa modern akan tumbuh lambat dan Indonesia tetap terjebak pada jasa bernilai tambah rendah.

Dalam konteks ini, strategi sumber daya manusia Indonesia harus lebih terhubung dengan struktur ekonomi yang ingin dibangun. Pendidikan umum tetap penting, tetapi ia harus dilengkapi dengan pendidikan

vokasi, *reskilling*, *upskilling*, sertifikasi industri, dan kemitraan yang lebih nyata antara kampus, politeknik, BLK, dan dunia usaha. Perguruan tinggi juga harus lebih kuat dalam riset terapan, bukan semata reproduksi teori. Negara yang ingin naik kelas tidak bisa membiarkan sistem pendidikannya berjalan pada logika lama, sementara struktur ekonominya menuntut kemampuan baru.

Narasi yang lebih praktis dapat dibayangkan dari dua lulusan sekolah menengah kejuruan. Yang pertama masuk ke pasar kerja tanpa pengalaman praktik, tanpa sertifikasi, dan tanpa koneksi dengan industri. Yang kedua belajar di sistem yang terhubung dengan kawasan industri, menjalani magang, memegang sertifikat, dan dibekali keterampilan digital dasar. Keduanya sama-sama "lulus", tetapi hanya yang kedua yang sungguh-sungguh dipersiapkan untuk ekonomi transformasional. Arah baru ekonomi Indonesia membutuhkan jauh lebih banyak lulusan tipe kedua.

IX. Pilar keenam: transformasi digital yang produktif

Ekonomi digital Indonesia sudah besar. World Bank menyebut bahwa Indonesia memiliki ekonomi digital terbesar di ASEAN, dengan **GMV mencapai US\$99 miliar pada 2025**. Namun ukuran pasar digital saja belum cukup. Justru tantangan berikutnya adalah menjadikan digitalisasi sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas lintas sektor. Laporan *Digital Foundations for Growth* menekankan kebutuhan memperkuat konektivitas, kepercayaan digital, keterampilan digital, dan kerangka digital pemerintah untuk mengurangi hambatan dan mempercepat kinerja ekonomi. ([World Bank](#))

Karena itu, digitalisasi harus dibedakan menjadi dua. Pertama, **digitalisasi konsumtif**, yakni penggunaan platform terutama untuk belanja, hiburan, dan transaksi sehari-hari. Kedua, **digitalisasi produktif**, yakni pemakaian teknologi digital untuk efisiensi logistik, pengelolaan inventori, akuntansi UMKM, pembelajaran adaptif, layanan kesehatan

jarak jauh, automasi proses bisnis, dan pengambilan keputusan berbasis data. Indonesia sudah relatif kuat pada yang pertama. Arah baru ekonomi Indonesia harus mempercepat yang kedua.

Di sektor UMKM, misalnya, digitalisasi produktif berarti bukan hanya hadir di marketplace, tetapi juga mampu mengelola stok, membaca data permintaan, mengakses pembiayaan digital, menata pencatatan keuangan, dan meningkatkan kualitas layanan. Di sektor pendidikan, digitalisasi produktif berarti bukan hanya pertemuan daring, tetapi juga sistem asesmen yang lebih baik, materi adaptif, dan akses pembelajaran yang lebih merata. Di sektor pemerintah, digitalisasi produktif berarti interoperabilitas data, perizinan yang lebih cepat, pengawasan anggaran yang lebih akurat, dan layanan publik yang lebih efisien. Bila semua ini bergerak bersamaan, digitalisasi akan menjadi pilar transformasi, bukan sekadar gejala modernisasi permukaan.

X. Pilar ketujuh: ketahanan pangan, energi, dan transisi keberlanjutan

Arah baru ekonomi Indonesia juga harus memasukkan dimensi ketahanan. Dalam beberapa tahun terakhir, inflasi sering kali kembali terasa terutama melalui harga pangan dan komponen yang sangat dekat dengan kehidupan rumah tangga. BPS mencatat inflasi tahunan Februari 2026 sebesar **4,76 persen**, naik dari **3,55 persen** pada Januari 2026. Bagi rumah tangga rentan, perubahan seperti ini bukan angka statistik; ia segera terasa dalam harga kebutuhan harian. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Karena itu, transformasi struktural Indonesia harus memandang **ketahanan pangan** sebagai bagian dari strategi ekonomi inti. Produksi pertanian, irigasi, logistik pangan, pergudangan, distribusi antardaerah, data pasokan, dan pembiayaan pertanian tidak bisa dibiarkan terpisah dari agenda pertumbuhan. Negara yang ingin naik kelas tetapi masih

rentan terhadap gejolak pangan akan selalu menghadapi tekanan sosial yang menghambat transformasi.

Hal yang sama berlaku untuk energi. Indonesia membutuhkan energi yang cukup, andal, dan semakin efisien jika ingin memperdalam industrialisasi. Di sisi lain, tren global menuntut transisi ke arah ekonomi yang lebih hijau. Maka arah baru Indonesia bukan memilih antara pertumbuhan dan keberlanjutan, melainkan membangun pertumbuhan yang lebih efisien energi, lebih tangguh terhadap guncangan harga, dan lebih siap terhadap perubahan standar global. Dalam jangka panjang, daya saing Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh kemampuannya menurunkan biaya energi, meningkatkan keandalan pasokan, dan menyesuaikan diri dengan tuntutan ekonomi rendah karbon.

XI. Pilar kedelapan: tata kelola, kepastian regulasi, dan negara yang efektif

Pada akhirnya, keberhasilan arah baru ekonomi Indonesia akan sangat ditentukan oleh kualitas negara. Banyak resep ekonomi sesungguhnya sudah diketahui. Indonesia memerlukan reformasi logistik, jasa, modal manusia, investasi publik, digitalisasi, dan hilirisasi yang lebih dalam. Tantangan terbesarnya sering bukan "apa yang harus dilakukan", melainkan **bagaimana memastikan ia dilakukan secara konsisten**.

World Bank secara eksplisit menekankan pentingnya **stable regulatory environment**, sementara laporan pertumbuhan dan pekerjaan menempatkan reformasi yang mendukung dunia usaha sebagai kunci. Artinya, kepastian regulasi bukan isu teknis yang kecil. Ia adalah bagian dari strategi produktivitas. Investor membutuhkan prediktabilitas. UMKM membutuhkan kesederhanaan. Pelaku ekspor membutuhkan kepastian prosedur. Pemerintah daerah membutuhkan kejelasan koordinasi. ([World Bank](#))

Negara yang efektif bukan sekadar negara yang membuat banyak kebijakan. Negara yang efektif adalah negara yang dapat memilih prioritas, menjaga konsistensi, menyinkronkan kementerian dan daerah, serta memastikan bahwa peraturan tidak saling membatalkan. Dalam konteks Indonesia, arah baru ekonomi akan sangat bergantung pada apakah negara mampu berpindah dari budaya administrasi menuju budaya eksekusi strategis.

Misalnya, sebuah kebijakan untuk mendorong industri baterai akan gagal bila regulasi energi, bea masuk, pendidikan vokasi, kawasan industri, dan sertifikasi lingkungan tidak berjalan seirama. Sebaliknya, bila berbagai instrumen itu dirajut secara konsisten, maka kebijakan industri akan mempunyai efek pengganda yang kuat. Jadi, tata kelola bukan lapisan tambahan dari transformasi struktural; ia adalah syarat agar transformasi itu benar-benar terjadi.

XII. Penutup: dari ekonomi yang tahan banting ke ekonomi yang naik kelas

Indonesia hari ini patut dihargai karena telah membangun sesuatu yang tidak mudah: **ketahanan**. Pertumbuhan tahun 2025 mencapai **5,11 persen**; inflasi masih dikelola dalam kerangka kebijakan yang aktif; BI menjaga stabilitas rupiah dengan cadangan devisa yang kuat; perdagangan masih mencatat surplus; fiskal tetap bekerja; investasi tumbuh; pengangguran dan kemiskinan menurun. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak sedang berdiri di tanah yang rapuh. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Namun, tugas sejarah Indonesia sekarang bukan sekadar mempertahankan ketahanan itu. Tugas sejarahnya adalah **menggunakannya sebagai pijakan untuk naik kelas**. Di situlah makna sesungguhnya dari arah baru ekonomi Indonesia. Arah baru itu bukan meninggalkan stabilitas, melainkan menjadikan stabilitas sebagai mesin bagi transformasi struktural: hilirisasi yang lebih dalam, reformasi jasa

dan logistik, investasi publik yang lebih efisien, pekerjaan yang lebih baik, keterampilan yang lebih relevan, digitalisasi yang produktif, ketahanan pangan dan energi, serta tata kelola yang lebih efektif. IMF dan World Bank sama-sama memberi pesan yang jelas: Indonesia memiliki ruang untuk tumbuh lebih cepat dan lebih berkualitas, tetapi ruang itu hanya akan terbuka bila reformasi struktur dilakukan dengan serius. (IMF)

Jika Indonesia hanya mempertahankan model pertumbuhan sekarang, ia mungkin tetap aman, tetap tumbuh, dan tetap dipuji karena stabil. Tetapi jika Indonesia berani memadukan stabilitas dengan perubahan struktur, maka ia tidak hanya akan aman—ia akan **maju**. Dan dalam ekonomi pembangunan, itulah perbedaan paling penting: antara negara yang sekadar berhasil menghindari kegagalan, dan negara yang sungguh-sungguh berhasil membangun masa depan.

Berikut **glosarium** dan **daftar pustaka** untuk naskah “**Arah Baru Ekonomi Indonesia: Dari Stabilitas Menuju Transformasi Struktural.**” Istilah dan rujukan ini diselaraskan dengan kerangka pembahasan sebelumnya yang bertumpu pada data resmi BPS, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, IMF, World Bank, OECD, dan WTO.

Glosarium

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

Rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara.

Arah baru ekonomi

Orientasi kebijakan pembangunan yang tidak lagi berhenti pada penjagaan stabilitas makro, tetapi diarahkan untuk membangun produktivitas, nilai tambah, dan transformasi jangka panjang.

BI-Rate

Suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang menjadi acuan utama arah kebijakan moneter.

Cadangan devisa

Aset luar negeri yang dimiliki otoritas moneter untuk menjaga kestabilan sektor eksternal, mendukung nilai tukar, dan memenuhi kebutuhan pembayaran internasional.

Defisit fiskal

Keadaan ketika belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara dalam satu tahun anggaran.

Daya beli

Kemampuan masyarakat membeli barang dan jasa berdasarkan tingkat pendapatan dan tingkat harga yang berlaku.

Digitalisasi produktif

Pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, kualitas layanan, dan nilai tambah ekonomi, bukan sekadar untuk konsumsi digital.

Diversifikasi ekonomi

Upaya memperluas basis kegiatan ekonomi agar tidak bergantung pada satu atau beberapa sektor tertentu.

Ekonomi digital

Seluruh aktivitas ekonomi yang didukung oleh teknologi digital, internet, data, platform, dan sistem elektronik.

Ekspor

Penjualan barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri.

Fondasi digital

Infrastruktur dan sistem dasar yang mendukung ekonomi digital, seperti konektivitas internet, pusat data, keamanan siber, identitas digital, dan interoperabilitas sistem.

Fragmentasi global

Pecahnya sistem ekonomi dunia ke dalam blok-blok yang lebih tertutup atau lebih dipengaruhi oleh kepentingan geopolitik, keamanan, dan proteksionisme.

Good jobs / pekerjaan baik

Pekerjaan yang produktif, relatif aman, berupah layak, dan memberi peluang pengembangan keterampilan serta mobilitas sosial.

Hilirisasi

Proses peningkatan nilai tambah melalui pengolahan bahan mentah atau komoditas primer menjadi produk antara atau produk akhir.

Hilirisasi tahap kedua / hilirisasi mendalam

Tahap lanjutan hilirisasi yang tidak hanya menambah proses pengolahan, tetapi juga membangun ekosistem industri, pemasok lokal, riset, desain, dan kemampuan teknologi domestik.

Inflasi

Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode.

Inflasi inti

Inflasi yang mencerminkan tekanan harga yang lebih mendasar karena

telah mengeluarkan komponen harga yang sangat bergejolak dan harga yang diatur pemerintah.

Investasi

Penanaman modal untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas usaha, dan memperoleh manfaat ekonomi di masa depan.

Investasi publik

Belanja pemerintah untuk aset atau proyek yang menambah kapasitas ekonomi jangka panjang, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sistem logistik.

Ketahanan ekonomi

Kemampuan suatu perekonomian untuk bertahan, menyesuaikan diri, dan pulih dari tekanan atau guncangan.

Ketahanan pangan

Kondisi ketika pangan tersedia, terjangkau, aman, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Kurs / nilai tukar

Harga mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain.

Nilai tambah

Kenaikan nilai ekonomi suatu barang atau jasa setelah melalui proses produksi, pengolahan, distribusi, atau inovasi.

Neraca perdagangan

Selisih antara nilai ekspor dan nilai impor suatu negara dalam suatu periode.

PDB (Produk Domestik Bruto)

Nilai total barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam wilayah suatu negara selama periode tertentu.

PDB per kapita

Nilai PDB dibagi jumlah penduduk; digunakan sebagai indikator kasar tingkat pendapatan rata-rata.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Komponen investasi dalam PDB yang mencerminkan pengeluaran untuk aset tetap seperti bangunan, mesin, dan peralatan produksi.

Produktivitas

Kemampuan menghasilkan output yang lebih besar atau lebih baik dari sejumlah input tertentu.

Reindustrialisasi

Upaya memperkuat kembali peran sektor industri pengolahan dalam struktur ekonomi nasional.

Resiliensi

Kemampuan untuk bertahan dan pulih dari tekanan, krisis, atau perubahan yang tidak diinginkan.

Sektor jasa modern

Kelompok jasa bernilai tambah tinggi seperti logistik, teknologi informasi, jasa profesional, keuangan, pendidikan, dan kesehatan.

Stabilisasi makroekonomi

Serangkaian kebijakan untuk menjaga inflasi, nilai tukar, pertumbuhan, fiskal, dan sistem keuangan tetap terkendali.

Surplus perdagangan

Keadaan ketika nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor.

Transformasi struktural

Perubahan komposisi ekonomi dari sektor berproduktivitas rendah ke sektor yang lebih modern, lebih produktif, dan lebih bernilai tambah.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

Kelompok usaha skala kecil hingga menengah yang berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja dan aktivitas ekonomi domestik.

Volatilitas pasar keuangan

Perubahan cepat dan tidak stabil pada harga aset, nilai tukar, suku bunga, dan arus modal.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. (2026). *Ekonomi Indonesia Tahun 2025 Tumbuh 5,11 Persen*.

Badan Pusat Statistik. (2026). *Inflasi year-on-year (y-on-y) pada Februari 2026 sebesar 4,76 persen*.

Badan Pusat Statistik. (2026). *Ekspor dan Impor Indonesia Januari 2026 masing-masing tercatat USD 22,16 miliar dan USD 21,20 miliar*.

Badan Pusat Statistik. (2026). *Ekspor dan Impor Indonesia Desember 2025 masing-masing tercatat USD 26,35 miliar dan USD 23,83 miliar*.

Badan Pusat Statistik. (2026). *November 2025: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,74 persen dan rata-rata upah buruh sebesar 3,33 juta rupiah*.

Badan Pusat Statistik. (2026). *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2025*.

Bank Indonesia. (2026). *Cadangan Devisa Januari 2026 Tetap Tinggi*.

Bank Indonesia. (2026). *BI-Rate Tetap 4,75%: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Memperkuat Stabilitas Nilai Tukar Rupiah, dan Tetap Menjaga Inflasi dalam Sasaran*.

International Monetary Fund. (2026). *World Economic Outlook Update, January 2026: Global Economy—Steady amid Divergent Forces*.

International Monetary Fund. (2026). *Indonesia: 2025 Article IV Consultation—Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Indonesia.*

International Monetary Fund. (2026). *Golden Vision 2045: Reaping the Gains from Trade.*

International Monetary Fund. (2026). *Golden Vision 2045: Making the Most Out of Public Investment in Indonesia.*

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. (2026). *Realisasi Investasi 2025 Lampau Target, Hilirisasi Melompat 43,3 Persen.*

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). *APBN KiTa Februari 2026: Kinerja Fiskal Kuat dan Berdampak Nyata.*

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025). *Global Economy Proves Resilient but Remains Fragile.*

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025). *OECD Economic Outlook, Volume 2025 Issue 2.*

World Bank. (2025). *Indonesia's Economy Maintains Resilience amid Global Uncertainty.*

World Bank. (2025). *Indonesia Economic Prospects, December 2025.*

World Bank. (2025). *Digital Foundations for Growth.*

World Bank. (2026). *Running Faster, for Longer.*

World Bank. (2026). *Services Competitiveness for Growth and Jobs in Indonesia.*

World Trade Organization. (2025). *Global Trade Outlook and Statistics Update: October 2025.*

Rudy C Tarumingkeng : *Arah Baru Ekonomi Indonesia: Dari Stabilitas Menuju Transformasi Struktural*

Copilot for this article - Chatgpt 5.2 Thinking. Access date: 2 Maret 2026
Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/6993af94-b27c-839a-b6fd-aabe357bdf4a>